

## KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar SKPD menyusun Rencana Strategis ( Renstra ) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menyusun Renstra tahun 2010 – 2015, yang mencakup Visi, Misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2010 – 2015. Dengan demikian, semua kegiatan yang dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan lptek, dan tantangan pembangunan ke depan, Materi Renstra yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Surabaya, 2012

**KEPALA DINAS,**

**Ir. Chalid Buhari**  
**Pembina Tk. I**

**NIP. 19651203 199302 1 001**

## A. PENGERTIAN UMUM

Pengertian – pengertian umum yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. *Daerah Otonom*, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. *Otonomi Daerah* adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. *Pemerintah Daerah* adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. *Pemerintah Daerah* adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. *Dinkominfo* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
6. *Telematika* ( telekomunikasi, multi media dan informatika ) adalah merupakan sinergi antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang diarahkan pada ketersediaan jaringan komunikasi dan data yang menghubungkan instansi pemerintah dalam rangka otomatisasi pelayanan umum.
7. *Pos* adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya.

8. *Telekomunikasi* adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic , radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. *Informasi* adalah hasil pengolahan data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakainya.
10. *Perangkat keras* adalah komponen fisik dari suatu sistem computer yang biasa hardware.
11. *Perangkat lunak* adalah suatu program computer yang mengaplikasikan urutan proses atau prosedur dari perangkat keras yang disebut software.
12. *Aplikasi* adalah suatu perangkat lunak yang mengaplikasikan suatu sistem dan/atau prosedur kerjadalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan/atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
13. *Sistem Informasi* untuk selanjutnya disingkat SI adalah suatu sistem yang memproses, mengelola dan mengorganisasi informasi untuk menyediakan informasi secara teliti dan tepat waktu. Pengertian Sistem Informasi dalam dokumen ini diasumsikan dengan suatu Sistem Informasi berbasis komputer.
14. *Internet* sebuah infrastruktur komunikasi tertutup yang dibuat berdasarkan standar – standar komunikasi internet dan standar – standar pemformatan informasi *World Wide Web*.
15. *Internet* adalah merupakan jaringan computer raksasa yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang lebih kecil di seluruh dunia.
16. *Lokal Area Network*, untuk selanjutnya disingkat LAN adalah suatu group komputer dan alat – alat lain yang disebar pada daerah yang terbatas dan dihubungkan oleh saluran komunikasi sehingga setiap piranti dapat saling berinteraksi. Istilah ini dikenal pula dengan nama jaringan komputer.

17. *Server* adalah suatu Komputer yang menjalankan piranti lunak administrative yang mengontrol akses ke semua atau bagian dari jaringan komputer beserta sumber – sumber dayanya ( seperti disk drive atau printer ). Komputer yang bertindak sebagai server menyediakan semua sumber daya bagi setiap computer yang bertindak sebagai workstation.
18. *Workstation*, pada umumnya istilah ini digunakan untuk menunjuk pada komputer – komputer atau terminal yang dihubungkan ke jaringan komputer.
19. *Website*, sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan ke dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lain. Halaman web bisa mencakup grafis, suara, animasi dan efek khusus lain sebagai tambahan pada teks.
20. *Elektronik Government*, untuk selanjutnya disingkat e – government, adalah suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet dalam pelayanan, masyarakat bisa mengakses berbagai informasi dan memperoleh pelayanan secara elektronik.
21. *Lembaga komunikasi masyarakat* adalah kelompok komunikasi yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat.
22. *Media Pertunjukan Rakyat*, adalah media penyebaran informasi melalui Pertunjukan Rakyat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mebidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pendayagunaan TIK serta pengendalian layanan jasa Pos dan Telekomunikasi dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan bagi jajaran pemerintah terwujudnya implementasi e – government secara utuh menjadi tujuan yang diharapkan. Dengan kepentingan itulah, maka Pemerintah Kota Surabaya membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan hal tersebut, kiranya berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat, di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi agen manajemen informasi sekaligus sebagai public relation di daerahnya.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi

pemerintah. Hal ini secara Teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Renstra DINKOMINFO Kota Surabaya Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RENJA DINKOMINFO, RKPD DINKOMINFO dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder DINKOMINFO Kota Surabaya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010-2015

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dinas, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu disusun Rencana Strategis yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan ( target kinerja ) untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Renstra selain mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebujaksanaan, Program dan Kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai, juga merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berkewajiban menyusun Renstra untuk tahun 2010 sampai dengan 2015.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e – Government
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
6. Siaran Pers Nomor 137/PIH/KOMINFO/6/2009 Tentang Himbauan Kepada Pemda Agar Bijak dalam Menyikapi Peraturan Menara Telekomunikasi di Saat efisiensi Bisnis Telekomunikasi
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rentra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2010-2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi kebijakan sasaran strategis selama 5 tahun.

Dengan demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2010-2015 bisa menjadi landasan untuk pembuatan dokumen RENJA DINKOMINFO, RKA DINKOMINFO, DPA DINKOMINFO dan RKPD DINKOMINFO didalam melaksanakan kegiatan yang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan RAPBD Kota Surabaya Setiap Tahun.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rancangan Renstra DINKOMINFO disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **a. Latar Belakang**

- b. Landasan Hukum
- c. Maksud Dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

## **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

## **BAB VI. PENUTUP**

## **BAB VII. LAMPIRAN**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, Good Government tata pemerintahan yang baik, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Di samping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance*. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya Teknologi Informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance melalui electronic government ( e – government )*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengendalian jasa Pos dan Telekomunikasi. Sebagai gambaran ada beberapa produk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan akan terus dikembangkan, antara lain sebagai berikut :

1. **JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI** merupakan kegiatan pelayanan perijinan bidang Pos, Telekomunikasi dan Telekomunikasi Khusus diantaranya ijin penyelenggaraan usaha jasa titipan, Ijin Amatir Radio ( I AR ), Ijin

Komunikasi Radio Antar Penduduk ( IKRAP ), ijin penguasaan perangkat amatir radio, ijin penguasaan perangkat KRAP dan dan penyelenggaraan ujian Negara amatir radio.

2. **INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam rangka mengimplementasikan *e – government* dan layanan publik berbasis TIK yang diIntegrasikan dengan Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Website. DINKOMINFO berusaha mewujudkan e-Service untuk mendukung terwujudnya Government to Government (G to G) dan Government to Citizen (G to C) dengan penyediaan sarana aplikasi berbasis website untuk pelayanan publik. Pelayanan Publik yang akan di beri sarana TIK sebanyak 108 Pelayanan Publik. Sarana TIK dalam hal ini adalah membangun Sistem Informasi Pelayanan secara Online kepada masyarakat dan menyediakan layanan jaringan komputer antar SKPD.
3. **MEDIA ON- LINE** merupakan fasilitas akses informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)
4. **PELAYANAN KELUHAN MASYARAKAT:** Adalah salah satu kegiatan Dinas Kominfo dalam rangka menghimpun, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk melalui beberapa media yaitu :
  - a. Telepon : 031-5456290 (Hotline)
  - b. Tollfree : 0800 1404 122 (Toll free)
  - c. Fax : 031-5463435
  - d. Sms : 0812 3025 7000
  - e. Website : [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)
  - f. Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
  - g. Twitter : @SapawargaSby
  - h. Email : [mediacenter@surabaya.go.id](mailto:mediacenter@surabaya.go.id)

Selain melalui media tersebut di atas, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui datang langsung ( tatap muka ), maupun melalui surat kabar melalui kolom surat pembaca. Keterbukaan akses informasi bagi publik, di sisi lain juga dapat menjadi salah satu alat

penunjang Kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah atau unit – unit kerjanya. Oleh karena itu sejak tahun 2005 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Surabaya memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diantaranya adalah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan atau kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik dan mampu berkiprah banyak serta lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas.

**5. PEMBERDAYAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) :**

Pemberdayaan KIM ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Instansi terkait sebagai nara sumber. Semua anggota KIM diundang dalam pertemuan tersebut. Dengan kegiatan KIM ini diharapkan dapat tercapainya transformasi informasi langsung kepada masyarakat melalui KIM baik berupa kebijakan Pemerintah, Program Pemerintah, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan kemandirian kewirausahaan masyarakat.

**6. PEKAN KIM JAWA TIMUR :** Pekan KIM ini telah diselenggarakan setahun sekali sejak tahun 2005 dengan peserta seluruh KIM yang ada di Jawa Timur . Kegiatan Pekan KIM ini bertujuan untuk memperkenalkan produk KIM Surabaya ke masyarakat guna menumbuhkan ekonomi masyarakat.

**7. PEMANFAATAN JASA INTERNET UNTUK PENDIDIKAN**

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas baik formal maupun non formal mulai SD/MI sampai SMP/MTs. Tolak ukur keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya angka kelulusan, angka partisipasi murni dan kasar, penurunan angka putus sekolah di jenjang pendidikan SD dan SMP; serta meningkatnya angka melanjutkan dari SD ke SMP.

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas DINKOMINFO
- d. Pengelolaan ketatausahaan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang kesekretariatan. Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut :

- a. Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
- i. Pemrosesan administrasi pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
- j. Pemrosesan administrasi pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

- k. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kota;
- l. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- m. Pemrosesan administrasi pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- n. Pemrosesan administrasi pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- o. Mengkoordinasikan pemberian izin mendirikan menara telekomunikasi dan pemanfaatannya sebagai sarana prasarana telekomunikasi;
- p. Pemrosesan administrasi pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota;
- q. Pemrosesan administrasi pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- r. Pemrosesan administrasi pemberian izin instalansi genset;
- s. Penyusunan peraturan daerah kota di bidang ketenagalistrikan;
- t. Pemrosesan administrasi pemberian izin instalasi penyalur petir.

**2.1.1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.1.2. Sub Bagian Keuangan** mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2. Bidang Pos dan Telekomunikasi**

Bidang Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi.

Rincian tugas Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagai berikut :

- a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
- b. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- c. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi dan Penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- d. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
- e. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;

##### **2.1.2.1. Seksi Pos dan Standarisasi** mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pos dan standarisasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pos dan standarisasi;

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pos dan standarisasi;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pos dan standarisasi;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.2.2. Seksi Spektrum Frekuensi, Telekomunikasi dan Standarisasi**

**Postel** mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi telekomunikasi dan standarisasi postel;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1.3. Bidang Aplikasi dan Telematika**

Bidang Aplikasi dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang aplikasi dan telematika.

Rincian tugas Bidang Aplikasi dan Telematika, sebagai berikut :

- a. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnnya;
- b. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
- c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota;
- d. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota;
- e. Penyediaan jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk;
- f. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota;

- g. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota;
- h. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota;
- i. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota;
- j. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kota;
- k. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kota;
- l. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- m. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota;
- n. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.

**2.1.3.1. Seksi Aplikasi dan Data Base** mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi dan data base;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aplikasi dan data base;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang aplikasi dan database;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang aplikasi dan data base;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**2.1.3.2. Seksi Telematika mempunyai fungsi :**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang telematika;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang telematika;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang telematika;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang telematika;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.4. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi**

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Rincian tugas Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, sebagai berikut :

- a. Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota;
- c. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.

**2.1.4.1. Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :**

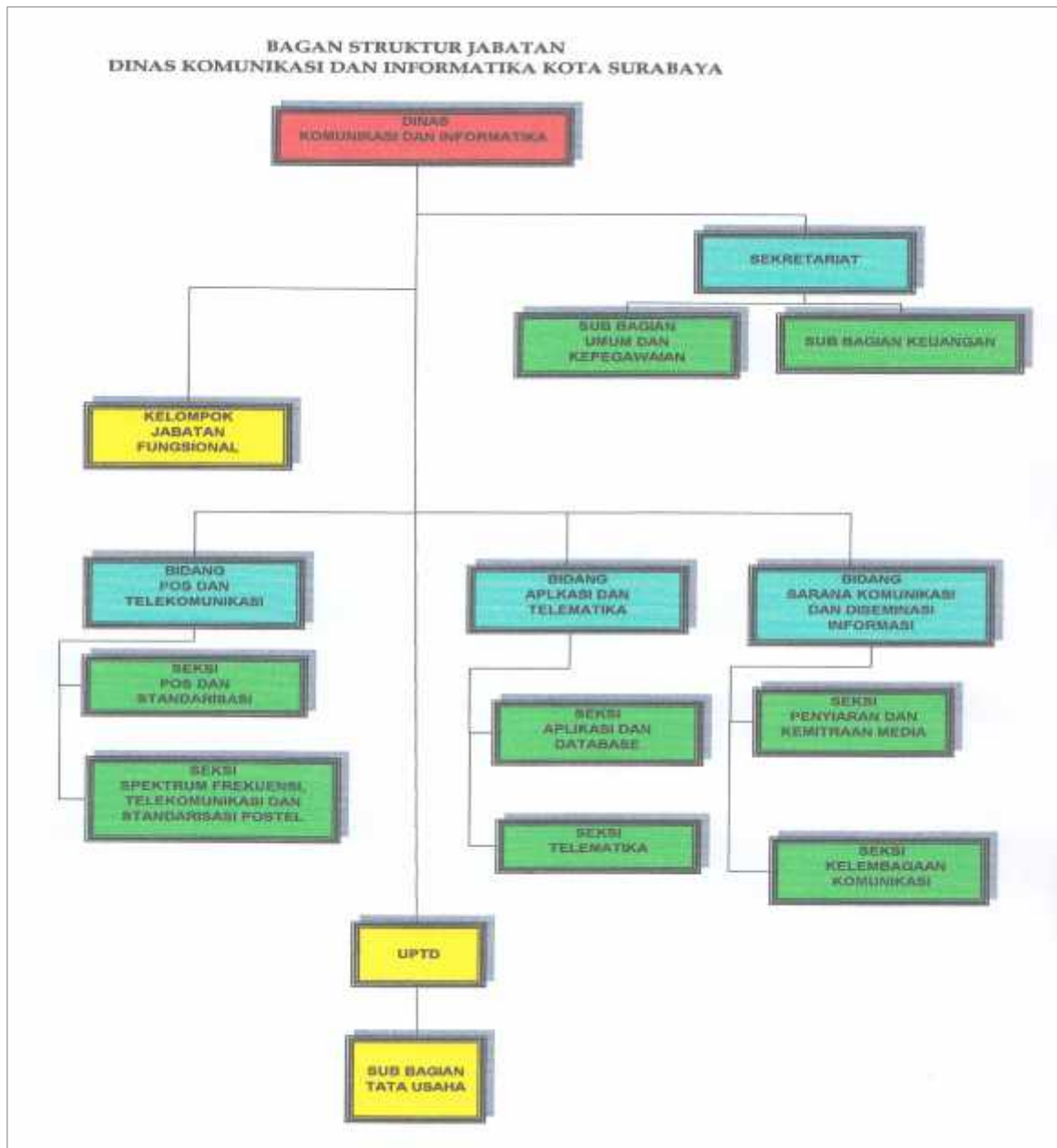
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penyiaran dan kemitraan media;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.4.2. Seksi Kelembagaan Komunikasi** mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan komunikasi;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan komunikasi;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelembagaan komunikasi;
- d. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan komunikasi;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI DINKOMINFO



### 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing global yang lebih kuat. Dalam mencapai peran yang diharapkan di atas, teknologi informasi diperlukan sumber daya untuk dapat memberikan nilai tambah pada tiap tahap dari rantai pasokan informasi, yang terdiri dari komponen-komponen teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia terutama dari segi PNS yang berpendidikan TIK sebanyak 12 orang
- b. Jaringan MAN yang sudah terbangun dengan backbone menggunakan jaringan fiber optik sedangkan titik access dan distribusi ke SKPD sebagian menggunakan wireless
- c. Portal domain sudah menggunakan sub domain [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id) dengan beberapa sub domain yang merupakan website seluruh SKPD.
- d. Tersedianya Anggaran ( yang cukup )
- e. Dukungan pihak swasta sebagai CSR yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan untuk perkembangan TIK di Surabaya
- f. Tersedianya Tupoksi yang mendukung diseminasi Informasi, pengembangan TIK Pos & Telekomunikasi.

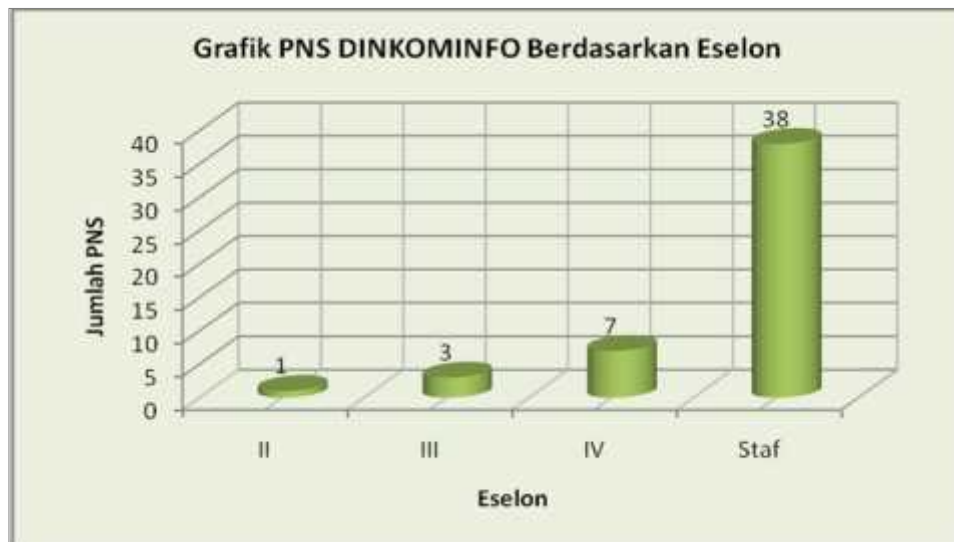
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jimerto No. 25 – 27 lantai V Kantor Pemkot Surabaya, telephone Telp. (031) 5475600; 5450082; 5460900; 5463770; 5463435; (031) 5312144 Pesawat 384; 527; 278; 175; 164; 232; 275; 292 dan Fax. ( 031 ) 5450154.

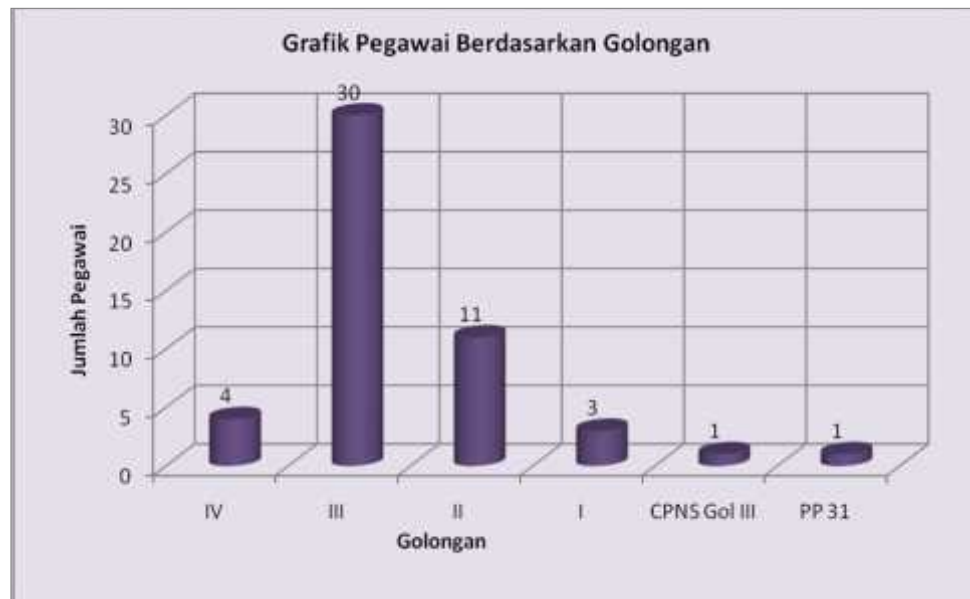
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2010 didukung oleh 50 (Lima Puluh) orang pegawai/karyawan yang terdiri 49 (Empat Puluh Sembilan) orang PNS dan 1 (satu) orang karyawan dengan status PP 31.

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, dilakukan pembagian tugas bagi Pejabat Eselon, sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 42 Tahun 2011.

Data jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya berdasarkan Golongan, Eselonisasi, Tingkat Pendidikan sebagaimana grafik berikut :

**GRAFIK PERBANDINGAN JUMLAH PEGAWAI  
BERDASARKAN ESELONISASI, TINGKAT PENDIDIKAN DAN  
GOLONGAN**





Sedangkan bila ditinjau dari aspek sarana dan prasarana untuk mendukung Kinerja Pengelolaan dan Pelayanan Kegiatan Komunikasi dan Informatika, bahwa sebagaimana kondisi yang ada, fasilitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya sebagaimana tabel berikut :

**Fasilitas Utama Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Surabaya**

NO	FASILITAS / SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Ruang Rapat / Seminar / Diskusi	1 Buah	Belum representatif
2.	Ruang khusus Kepala Bidang /sekretaris	4 Ruang	Ada
3.	Ruang Media Center	1 Ruang	Ada
4.	Ruang Server	1 Ruang	Cukup representatif
5.	Kendaraan roda 4 (empat)	6 Unit	4 Unit kurang layak
6.	Kendaraan roda 2 ( dua )	8 Unit	2 Unit kurang layak
7.	Ruang KTR	1 Ruang	Kurang representatif
8.	Mesin Photo Copy	1 Unit	Sewa
9.	Jaringan Internet	11 MBps	baik

10.	Komputer ( PC, Laptop )	52 Unit	17 kurang baik
11.	Telephone / Extension	14 Unit	2 Unit kurang baik
12.	Faximili	2 Unit	baik
13	LCD	5 Unit	baik
14	In Fokus	2 Unit	1 Unit kurang baik
15	Layar Screen	3 Unit	baik
16	Ruang Media Center	1 Ruang	Cukup representatif
17	Ruang Studio	1 Ruang	Cukup representatif

Catatan : sarana dan prasarana lain sebagaimana ada pada Kartu Inventaris Ruangan Barang ( terlampir ).

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance melalui electronic government ( e – government )*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melakukan pengendalian jasa Pos dan Telekomunikasi. Sebagai gambaran ada beberapa produk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan akan terus dikembangkan, antara lain sebagai berikut :

- 1. JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI** merupakan kegiatan pelayanan perijinan bidang Pos, Telekomunikasi dan Telekomunikasi Khusus diantaranya ijin penyelenggaraan usaha jasa titipan, Ijin Amatir Radio ( I AR ), Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk ( IKRAP ), ijin penguasaan perangkat amatir radio, ijin penguasaan perangkat KRAP dan dan penyelenggaraan ujian Negara amatir radio.
- 2. INFRASTRUKTUR JARINGAN TIK** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dan database dalam rangka mengimplementasikan *e – government* dan layanan publik berbasis TIK yang diIntegrasikan dengan Aplikasi Pelayanan Publik

Berbasis Website. DINKOMINFO berusaha mewujudkan e-Service untuk mendukung terwujudnya Government to Government (G to G) dan Government to Citizen (G to C) dengan penyediaan sarana aplikasi berbasis website untuk pelayanan publik. Pelayanan Publik yang akan di beri sarana TIK sebanyak 108 Pelayanan Publik. Sarana TIK dalam hal ini adalah membangun Sistem Informasi Pelayanan secara Online kepada masyarakat dan menyediakan layanan jaringan komputer antar SKPD.

**3. MEDIA ON- LINE** merupakan fasilitas akses informasi berbasis Teknologi Informasi Komunikasi untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui situs [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)

**4. PELAYANAN KELUHAN MASYARAKAT:** Adalah salah satu kegiatan Dinas Kominfo dalam rangka menghimpun, dan menindaklanjuti keluhan masyarakat yang masuk melalui beberapa media yaitu :

- a. Telepon : 031-5456290 (Hotline)
- b. Tollfree : 0800 1404 122 (Toll free)
- c. Fax : 031-5463435
- d. Sms : 0812 3025 7000
- e. Website : [www.surabaya.go.id](http://www.surabaya.go.id)
- f. Facebook : Sapawarga Kota Surabaya
- g. Twitter : @SapawargaSby
- h. Email : [mediacenter@surabaya.go.id](mailto:mediacenter@surabaya.go.id)

Selain melalui media tersebut di atas, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui datang langsung ( tatap muka ), maupun melalui surat kabar melalui kolom surat pembaca. Keterbukaan akses informasi bagi publik, di sisi lain juga dapat menjadi salah satu alat penunjang Kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah atau unit – unit kerjanya. Oleh karena itu sejak tahun 2005 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Surabaya memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diantaranya adalah menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pelayanan atau kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Program ini dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan



informasi publik dan mampu berkiprah banyak serta lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas.

**5. PEMBERDAYAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) :**

Pemberdayaan KIM ini adalah sebuah kegiatan yang dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dengan melibatkan Instansi terkait sebagai nara sumber. Semua anggota KIM diundang dalam pertemuan tersebut. Dengan kegiatan KIM ini diharapkan dapat tercapainya transformasi informasi langsung kepada masyarakat melalui KIM baik berupa kebijakan Pemerintah, Program Pemerintah, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan kemandirian kewirausahaan masyarakat.

**6. PEKAN KIM JAWA TIMUR :** Pekan KIM ini telah diselenggarakan setahun sekali sejak tahun 2005 dengan peserta seluruh KIM yang ada di Jawa Timur . Kegiatan Pekan KIM ini bertujuan untuk memperkenalkan produk KIM Surabaya ke masyarakat guna menumbuhkan ekonomi masyarakat.

**7. PELATIHAN GRATIS**

Pemanfaatan sarana pelatihan gratis bagi seluruh masyarakat surabaya dengan sarana prasarana disediakan oleh CSR dan pengelolaannya dilakukan oleh DINKOMINFO. Pelatihan gratis memungkinkan penyebaran informasi secara cepat melalui teknologi TIK masyarakat diharapkan tidak GAPTEK TIK.

**8. PEMANFAATAN JASA INTERNET UNTUK PENDIDIKAN**

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas baik formal maupun non formal mulai SD/MI sampai SMP/MTs. Tolak ukur keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya angka kelulusan, angka partisipasi murni dan kasar, penurunan angka putus sekolah di jenjang pendidikan SD dan SMP; serta meningkatnya angka melanjutkan dari SD ke SMP

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara substansi, hubungan RENSTRA DINKOMINFO kota Surabaya dengan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur dan Renstra DEPKOMINFO, RENSTRA DINKOMINFO kota Surabaya berpedoman pada substansi tujuan pemanfaatan teknologi Informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat

Hubungan secara substansi yang ada dalam Renstra DEPKOMINFO, RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur dan RENSTRA DINKOMINFO kota Surabaya terdapat benang merah yang saling terkait, sebagaimana dalam tabel Sinkronisasi Renstra DEPKOMINFO, RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur dan RENSTRA DINKOMINFO kota Surabaya di bawah ini :

<b>RENSTRA DEPKOMINFO</b>	<b>RENSTRA DISKOMINFO Propinsi Jawa Timur</b>	<b>RENSTRA DINKOMINFO kota Surabaya</b>
<b>Visi :</b> <i>"Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"</i>	<b>VISI :</b> <i>"Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Mandiri Dan Beretika Melalui Komunikasi Dan Informatika"</i>	<b>VISI :</b> <i>"Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Didukung Teknologi Informasi Dan Komunikasi"</i>
<b>Misi :</b> 1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI; 2. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;	<b>Misi :</b> 1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerjasama lembaga komunikasi dan informatika. 2. Meningkatkan profesionalisme Aparatur bidang komunikasi dan informatika dan e-literacy masyarakat. 3. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan	<b>Misi :</b> 1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerjasama Lembaga Komunikasi dan Informatika 2. Mewujudkan profesionalisme Aparatur layanan komunikasi informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana

<p>3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ;</p> <p>4. Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;</p> <p>5. Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.</p>	<p>pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan, penyelenggaraan jasa pos, dan telekomunikasi.</p>	<p>yang memadai</p> <p>3. Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi ( TIK ) melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan public</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan penyelenggara jasa Pos dan Telekomunikasi</p>
--	---	--

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Faktor lingkungan internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya bisa teridentifikasi sebagai berikut :

##### ◆ Identifikasi kekuatan, kelemahan, Peluang dan tantangan

Faktor lingkungan internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya bisa diidentifikasi antara lain :

##### IDENTIFIKASI FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL			
NO	KEKUATAN ( STRENGTH )	NO	KELEMAHAN ( WEAKNESS )
1	Tersedianya Anggaran	1	Terbatasnya tenaga teknis Bidang IT
2	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup memadai	2	Kurang efektifnya pengawasan kepada SKPD yang membangun aplikasi
3	Tersedianya Sarana & Prasarana di Bidang IT yg memadai	3	Rendahnya Kualitas Monitoring & Evaluasi
4	Ada Program Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban	4	Kurangnya Tenaga Ahli
5	Kerjasama Antar SKPD yang Baik	5	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IT belum efektif dan efisien
6	Tersedianya Tupoksi yang mendukung diseminasi Informasi, pengembangan TIK Pos & Telekomunikasi	6	Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional
		7	Kurangnya kemampuan mengembangkan tupoksi dalam hal penjabaran diseminasi informasi
		8	Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat
		9	Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD
		10	Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK

FAKTOR EKSTERNAL			
NO	PELUANG ( OPPORTUNITIES )	NO	ANCAMAN ( THREATS )
1	Tersedianya Peraturan Walikota ( Kebijakan Walikota tentang IT )	1	Rendahnya kualitas SDM pada SKPD di bidang Teknis IT
2	Penerapan Elektronik Government	2	Adanya ketakutan SKPD terhadap database yang dimiliki (kurang transparan, kurang lengkap)
3	Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi sendiri	3	Kurangnya dukungan SKPD terhadap IT (kurang <i>update</i> data)
4	Adanya Dukungan Dari Asosiasi Penyelenggara Jasa telekomunikasi	4	Banyaknya Penyelenggara Jasa Pos dan Telekomunikasi Tanpa Ijin ( Illegal )
5	Adanya Kepercayaan Masyarakat	5	Belum Adanya Payung Hukum
6	Adanya kerjasama dengan operator	6	Belum adanya site/cell plan dalam pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi
7	Kepedulian pimpinan terhadap bidang Kominfo	7	Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
8	Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan	8	Kesenjangan informasi di masyarakat
9	Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik	9	Pesatnya perkembangan TIK
10	Kebutuhan pengembangan muatan e-Government	10	Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
11	Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi	11	Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata
11	Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan	12	Adanya tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik
13	Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo		

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Walikota Surabaya mempunyai misi :

**MENUJU SURABAYA LEBIH BAIK  
sebagai KOTA JASA dan PERDAGANGAN yang  
CERDAS, MANUSIAWI, BERMARTABAT, dan  
BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Untuk menunjang visi diatas, DINKOMINFO berperan pada misi ke 3

Walikota periode 2010 – 2015 yaitu :

**“ Mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.”**

Pada misi ini DINKOMINFO menunjang Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Menegaskan komitmen bahwa untuk menghadirkan suasana kota yang lebih manusiawi harus dimulai dari penyediaan layanan publik yang prima sesuai norma-norma kemanusiaan yang berlaku secara universal dengan sasaran Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Yang Ditandai Dengan Peningkatan Kualitas Layanan Publik;
2. Mengutamakan penerapan standar layanan publik yang mengarah pada kesetaraan dengan tolok ukur internasional demi mendukung peningkatan daya saing kota dari perspektif ekonomi, bisnis, dan investasi global dengan sasaran Peningkatan Daya Saing Kota Untuk Mendukung Iklim Investasi.

Dengan TIK, DINKOMINFO terus mengoptimalkan pelayanan publik. Beberapa penyediaan fasilitas TIK baik itu dari segi aplikasi ataupun infrastruktur jaringan yang digunakan dan dimanfaatkan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Disamping itu pula, DINKOMINFO juga menyediakan beberapa fasilitas TIK yang dapat digunakan masyarakat secara gratis sehingga masyarakat yang tidak GAPTEK IT bisa terwujud.

### 3.3. Telaahan Rensta K/L dan Renstra

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2015 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan yaitu pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan

komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2010-2015 Bidang Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- a. Eksklusivitas sumber daya dan infrastruktur menjadi pemakaian bersama sumber daya dan infrastruktur.
- b. Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi.
- c. Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa lebih dominan menyajikan konten hiburan, sementara jalur birokrasi untuk penyampaian informasi belum terkoordinasi dengan baik, baik antar lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi.
- d. Kecenderungan positif terjadi yaitu berkembangnya citizen journalism, dimana anggota masyarakat berperan melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya.
- e. Perubahan kebudayaan dari yang manual berubah menjadi elektronik

### **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK ) yang berkembang pesat, keberadaannya mulai menjadi bagian dari keseharian masyarakat kita baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun di sisi lain kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat sehingga, masih memunculkan kesenjangan yang semakin hari semakin bertambah.

e – government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan public secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance ).

Implementasi e – government yang mulai berkembang di Kota Surabaya dalam lima tahun terakhir di nilai oleh pemerintah pusat sebagai kota yang berhasil dengan baik. Namun secara substansif masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e – government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumberdaya manusia.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance ) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang se luas – luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (society participation) dalam proses pembangunan bangsa.

Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat, Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media – media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi – sosialisasi dan pertunjukan rakyat.

Berkembangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa titipan Pos, menandai bergesernya peran pemerintah dalam bidang Pos dari pelaku menjadi fasilitator dan regulator. Oleh karena itu langkah penataan dan pengawasan menjadi bagian penting untuk dilakukan. Demikian pula dengan telekomunikasi, yang perkembangannya sangat cepat sehingga berdampak pada penyediaan infrastruktur pendukungnya. Berdirinya menara BTS ( Base Transceiver Station ) yang begitu menjamur dari penyedia jasa telekomunikasi akan menjadi permasalahan tersendiri bagi daerah apabila tidak dilakukan penataan.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) merupakan tantangan bagi jajaran



pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang – Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatu secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika**

##### **4.1.1. Visi :**

VISI adalah salah satu dari Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Disamping itu Visi itu juga merupakan pemandu arah bagi institusi dalam menyusun dan melaksanakan kegiatannya, dengan tujuan tercapainya Visi. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya menetapkan Visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA YANG DIDUKUNG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI”**

Dengan adanya pelayanan prima yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik secara on line yang transparan dan lebih baik dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat dan akurat serta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan prima sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Namun untuk mencapai pelayanan prima tersebut tidak mudah dan membutuhkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang memadai serta dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun pelayanan prima tersebut meliputi :

1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik secara cepat, mudah, murah dan berkepastian.
2. Pengembangan pelayanan publik berbasis on – line yang transparan dan akuntabel
3. Pendistribusian pos pelayanan publik di setiap kecamatan dan kelurahan
4. Peningkatan kualitas SDM pelayanan publik
5. Penciptaan sistem pengaduan masyarakat secara on line dan memberikan sanksi yang tegas serta terbuka terhadap kualitas layanan publik

Masyarakat informasi merupakan kondisi masyarakat dimana setiap orang dapat membuat, mengakses, memanfaatkan dan berbagi informasi serta pengetahuan, yang memungkinkan setiap individu, komunitas dan masyarakat untuk mencapai potensi mereka dalam rangka mengembangkan pembangunan. Masyarakat informasi adalah suatu masyarakat di mana kualitas hidup, dan prospek untuk perubahan sosial dan pembangunan ekonomi, tergantung pada peningkatan informasi dan pemanfaatannya. Dalam masyarakat seperti ini, standart hidup pola – pola kerja dan kesenangan, sistem pendidikan dan pemasaran barang – barang sangat dipengaruhi oleh akumulasi peningkatan informasi dan pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya intensitas produksi informasi dan pelayanan, komunikasi yang luas melalui media dan banyak diantaranya dilakukan secara elektronik.

Masyarakat informasi menghadapkan kita pada tantangan – tantangan baru dan kesempatan perkembangan – perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Dampak dari teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sebuah definisi sementara yang kuat, dan ini mentransformasi aktivitas ekonomi dan sosial. Kunci yang penting dari jaringan teknologi dalam masyarakat informasi adalah teknologi membantu kita untuk membuat koneksi – koneksi baru. Koneksi – koneksi dimana tantangan tradisional menerima apa yang tidak mungkin, dan ketika hal tersebut menjadi mungkin. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi bagian penting untuk masyarakat informasi sebagai ekonomi kecil yang terbuka dalam pengembangan jaringan ekonomi global, dimana pengetahuan berbasis pada inovasi yang menjadi kunci sumber dari penopang keuntungan yang kompetitif.

Selaku Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mebidangi penyusunan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya bertekat menghantarkan masyarakat Surabaya menjadi masyarakat informasi yang mandiri dari pengaruh negatif informasi dan beretika dalam memanfaatkan informasi.

Semua itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika secara efisien dan efektif.

#### **4.1.2. Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinkominfo di atas, maka disusunlah Misi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dengan Misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan juga peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Misi ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerjasama Lembaga Komunikasi dan Informatika
- b. Mewujudkan profesionalisme Aparatur layanan komunikasi informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
- c. Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi ( TIK ) melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan public
- d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan penyelenggara jasa Pos dan Telekomunikasi

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**

##### **4.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang. Oleh sebab itu, tujuan disusun untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing – masing Misi yang tertuang dalam table terlampir

#### 4.2.2. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan Visi, Misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### TUJUAN DAN SASARAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Terwujudnya Pelayanan Prima yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerjasama Lembaga Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan kecerdasan , pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika	a. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media b. Terlaksananya pemberdayaan potensi lembaga komunikasi masyarakat c. Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik
		2. Mewujudkan Aparatur layanan komunikasi informatika yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi yang didukung oleh	a. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur b. Meningkatkan kapasitas SDM bidang	a. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur b. Terwujudnya

		sarana dan prasarana yang memadai	komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan profesionalisme dan keterbukaan informasi	peningkatan pemahaman dan ketrampilan bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat
		3. Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melalui pengembangan aplikasi, <i>muatan</i> layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik	a. Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik
		4. Meningkatkan pembinaan , pengawasan dan pengendalian terhadap <i>pengusahaan</i> penyelenggara jasa Pos dan Telekomunikasi	Meningkatkan tertib penyelenggaraan usaha jasa titipan dan telekomunikasi	Terlaksananya penerbitan ijin usaha penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi untuk mewujudkan standart pelayanan publik

### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### Formulasi strategi SWOT

Kesimpulan Analisis	STRENGTH ( S )	WEAKNESS ( W )
<b>Faktor Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Anggaran ( yang cukup )</li> <li>2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang cukup memadai</li> <li>3. Tersedianya Sarana &amp; Prasarana di Bidang IT yg memadai</li> <li>4. Ada Program Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban</li> <li>5. Kerjasama Antar SKPD yang Baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya tenaga teknis Bidang IT</li> <li>2. Kurang efektifnya pengawasan kepada SKPD yang membangun aplikasi</li> <li>3. Rendahnya Kualitas Monitoring &amp; Evaluasi</li> <li>4. Kurangnya Tenaga Ahli</li> <li>5. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IT belum efektif dan efisien</li> </ol>

<p><b>Kesimpulan Analisis</b></p> <p><b>Faktor Eksternal</b></p>	<p>6. Tersedianya Tupoksi yang mendukung diseminasi Informasi, pengembangan TIK Pos &amp; Telekomunikasi.</p>	<p>6. Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional</p> <p>7. Kurangnya kemampuan mengembangkan tupoksi dalam hal penjabaran diseminasi informasi</p> <p>8. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat</p> <p>9. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD</p> <p>10. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK</p>
--	---	---

OPORTUNITIES ( O )	STRATEGI ( S – O )	STRATEGI ( W – O )
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Peraturan Walikota ( Kebijakan Walikota tentang IT )</li> <li>2. Penerapan Elektronik Government</li> <li>3. Banyaknya SKPD yang membangun aplikasi sendiri</li> <li>4. Adanya dukungan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi</li> <li>5. Adanya Kepercayaan Masyarakat terhadap kominfo</li> <li>6. Adanya kerjasama dengan operator IT</li> <li>7. Kepedulian pimpinan terhadap Kominfo</li> <li>8. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT ( infrastruktur jaringan, database, aplikasi ) untuk menerapkan kebijakan Walikota ( S3 – O1 )</li> <li>2. Menerapkan tren positif E – Governmen dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia ( S1 – O11 )</li> <li>3. Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif ( S2 – O8 )</li> <li>4. Memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai TUPOKSI organisasi, komitmen dan kepedulian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap SKPD yang membangun aplikasi sesuai dengan kebijakan walikota dan perundangan yang berlaku ( W2 – O1 )</li> <li>2. Meningkatkan kualitas proses dan output yang dihasilkan oleh integrasi sarana informasi dan database SKPD dengan memanfaatkan tren positif penerapan E – Government dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan ( W10 – O3 )</li> <li>3. Mengembangkan layanan publik yang interaktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat agar seiring dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya</li> </ol>

9. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik 10. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government 11. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi 12. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan 13. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo	pemimpin ( S6 – O7 ) 5. Mewujudkan layanan public sesuai kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi melalui sarana dan prasarana IT yang ada ( S3 – O11 )	informasi ( W10 – O11) 4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IT guna memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan ( W5 – O12 ) 5. Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan akan pendayagunaan media informasi dan komunikasi ( W10 – O8 ) 6. Memaksimalkan pengembangan media center sebagai pusat informasi masyarakat agar sejalan dengan kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi ( W10 – O11 ) 7. Meningkatkan kemampuan untuk memberdayakan potensi ( IT ) masyarakat guna memenuhi kebutuhan pendayagunaan media informasi dan komunikasi ( W8 – O4 )
TREATS ( T )	STRATEGI ( S – T )	STRATEGI ( W – T )
1. Rendahnya kualitas SDM pada SKPD di bidang Teknis IT 2. Adanya ketakutan SKPD terhadap database yang dimiliki ( kurang transparan, kurang lengkap ) 3. Kurangnya dukungan SKPD terhadap IT (kurang <i>update</i> data)	1. Memenuhi tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik dengan anggaran yang tersedia ( S1 – T12 ) 2. Meningkatkan kualitas SDM bidang IT di SKPD sesuai TUPOKSI organisasi yang mendukung pengembangan IT (	1. Mengefektifkan komunikasi dan pengawasan terhadap SKPD yang membangun aplikasi untuk meningkatkan dukungan dan kesadaran SKPD terhadap pengembangan IT ( W2 – T3 ) 2. Meningkatkan kualitas proses dan output yang dihasilkan oleh integrasi Sarana Informasi dan



<p>4. Banyaknya Penyelenggara Jasa Pos dan Telekomunikasi tanpa ijin ( Illegal )</p> <p>5. Belum Adanya Payung Hukum</p> <p>6. Belum adanya site / cell plan dalam pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi</p> <p>7. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik</p> <p>8. Kesenjangan informasi di masyarakat</p> <p>9. Pesatnya perkembangan TIK</p> <p>10. Terbatasnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap TIK</p> <p>11. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata</p> <p>12. Adanya tuntutan masyarakat untuk layanan publik yang transparan dan lebih baik</p>	<p>S3 – T1 )</p> <p>3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aplikasi dan database SKPD dengan anggaran yang tersedia ( S1 – T3 )</p> <p>4. Meningkatkan dukungan dan kesadaran SKPD terhadap pengembangan IT melalui Sarana dan Prasarana IT yang ada (S3 – T3 )</p> <p>5. Memenuhi tuntutan Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik secara kreatif dan inovatif ( S3 – T7)</p> <p>6. Mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat melalui sarana dan prasarana IT yang ada ( S2 – T8 )</p> <p>7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan sarana dan prasarana IT yang tersedia ( S2 – S3 – T7 )</p>	<p>database SKPD untuk meningkatkan kinerja SKPD ( W10 – T3 )</p> <p>3. Mengembangkan layanan publik yang interaktif dan menyentuh kebutuhan masyarakat untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan public yang transparan dan lebih baik ( W3 – T12 )</p> <p>4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengembangan dan dan pemeliharaan sarana dan prasarana IT guna memenuhi tuntutan dan dampak globalisasi informasi akan keterbukaan informasi publik ( W3 – T7 )</p> <p>5. Mengoptimalkan pengembangan data center yang memenuhi kebutuhan ke depan dan memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik yang transparan dan lebih baik ( W10 – T12 )</p> <p>6. Memaksimalkan pengembangan media center sebagai pusat informasi masyarakat untuk mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat ( W6 – T8 )</p> <p>7. Menyiapkan dan menyediakan paying hukum yang memperkuat setiap kebijakan IT di daerah termasuk pemenuhan tuntutan transparansi layanan publik, peningkatan kualitas SDM bidang IT di SKPD dan peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat ( W1 – W5 – T12 –</p>
--	---	---

---

		<p>T5 )</p> <p>8. Meningkatkan kemampuan untuk memberdayakan potensi ( IT ) masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat ( W7 – T10 )</p>
--	--	--

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, Visi, dan Misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

#### **I. KELOMPOK SASARAN TERLAKSANANYA KERJASAMA DAN KEMITRAAN MEDIA ( M1.a )**

##### **1. Program Kerjasama Publikasi Informasi Dengan Media Massa dengan kegiatan sebagai berikut :**

- ❖ **Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Massa**

**II. KELOMPOK SASARAN TERLAKSANANYA PEMBERDAYAAN POTENSI LEMBAGA KOMUNIKASI MASYARAKAT ( M1.b )**

**1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Fasilitasi dan Pemberdayaan Kelembagaan Komunikasi
- ❖ Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah
- ❖ Pengelolaan dan Pengumpulan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

**III. KELOMPOK SASARAN TERLAKSANANYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ( M1.c )**

**1. Program Peningkatan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat** dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pelayanan Keluhan / Pengaduan Masyarakat

**IV. KELOMPOK SASARAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR ( M2.a )**

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- ❖ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

**V. KELOMPOK SASARAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN KETRAMPILAN BIDANG TIK BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT ( M2.b )**

**1. Program Manajemen Pendidikan** dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan

**2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ( TI )**

dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan pendayagunaan Open Source Software
- ❖ Pelatihan, workshop dan Sosialisasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ( TIK )

**3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Peningkatan disiplin dan kapasitas SDM aparatur
- ❖ Penyusunan laporan tahunan Akuntabilitas Kinerja, Rencana Kerja, serta Rencana Strategis SKPD

**VI. KELOMPOK SASARAN TERSELENGGARANYA PEMERATAAN  
INFRASTRUKTUR TIK UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (M3.a)**

**1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi ( TI )**

dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan Informasi
- ❖ Pemeliharaan sarana jaringan Komunikasi dan Informasi
- ❖ Pembangunan Sistem Jaringan Komunikasi dan Informasi pelayanan publik
- ❖ Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

**VII. KELOMPOK SASARAN TERLAKSANAYA IJIN USAHA  
PENYELENGGARAAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI UNTUK  
MEWUJUDKAN STANDART PELAYANAN PUBLIK**

**1. Peningkatan Standart Pelayanan Dalam Penyelenggaraan Usaha  
Pos dan Telekomunikasi** dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pengawasan dan pembinaan perijinan di Bidang Pos dan Telekomunikasi
- ❖ Pembangunan prasarana jaringan Telekomunikasi
- ❖ Pemeliharaan prasarana jaringan Telekomunikasi
- ❖ Penyusunan kajian di Bidang Telekomunikasi, Komunikasi dan Informasi
- ❖ Pemanfaatan menara bersama Telekomunikasi

## **BAB VI**

### **INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran, tujuan dan misi dari instansi.

Berikut ini diuraikan indikator kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang telah dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis.

#### **1. Tujuan**

Tujuan yang dijabarkan berdasarkan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya adalah :

- b. Meningkatkan kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
- d. Meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan profesionalisme dan keterbukaan informasi
- e. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik.
- f. Meningkatkan tertib penyelenggaraan usaha jasa titipan dan telekomunikasi

**2. Indikator Kineja dan Rencana Tingkat capaian Kegiatan Tahun 2010 sebagai berikut :**

NO	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Meningkatkan kecerdasan , pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika	1. Terlaksananya kerjasama dan kemitraan media  2. Terlaksananya pemberdayaan potensi lembaga komunikasi masyarakat  3. Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik	Jumlah Talkshow di Radio dan TV serta pemuatan informasi di media cetak  Jumlah penyelenggaraan Pertura, Korinko dan KIM, Pameran keliling, pemutaran film dokumentasi, siaran keliling, surabata Great Expo, buku Surabaya Dalam Angka, Content website surabaya.go.id, buku profil Surabaya, film profil Surabaya, dan Film dokumentasi  Pelayanan keluhan / pengaduan masyarakat
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran
3.	Meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan profesionalisme dan keterbukaan informasi	2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan ketrampilan bidang TIK bagi aparatur dan masyarakat	1. Meningkatnya jumlah guru SD, SMP, SMA/SMK yang mampu mengoperasikan internet untuk pendidikan 2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti pelatihan , workshop dan sosialisasi Bidang TIK 3. Meningkatnya disiplin dan kapasitas SDM aparatur,serta jumlah penyusunan laporan SKPD ( LAKIP, RENJA, RENSTRA )

4	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dalam rangka memperluas aksesibilitas masyarakat memperoleh informasi dan peningkatan pelayanan publik	Terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik	Jumlah pembangunan dan pengembangan jaringan Unit Kerja / SKPD
5	Meningkatkan tertib penyelenggaraan usaha jasa titipan dan Telekomunikasi	Terlaksananya penerbitan ijin usaha penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi untuk mewujudkan standart pelayanan publik	Jumlah penerbitan ijin usaha penyelenggaraan usaha jasa Pos dan Telekomunikasi ( usaha jasa titipan, warnet, wartel dll )



## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2010 – 2015, merupakan rencana tindak seluruh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Dinkominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kota Surabaya. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Surabaya.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebgus apapun isi dari Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Kominfo menjadi SKPD yang hebat dan berhasil mewujudkan Visi dan Misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh – sungguh dari seluruh aparatur Dinas Kominfo untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk diikrarkan oleh kita semua jajaran Dinas Kominfo, bahwa program dan kegiatan yang telah disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional

berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya masyarakat Surabaya yang informatif, mandiri dan beretika melalui Komunikasi dan Informatika.